

Peran Multi *Stakeholder* Dalam Pengembangan Kemitraan Desa Wisata di masa pandemi COVID-19 di Desa Benowo, Kabupaten Purworejo

Alfina Tri Muslimawati*) Budi Setiyono**)

Email: wati.wt390@gmail.com budisetiyono@lecturer.undip.ac.id

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024)7465407

Faksimile (024)7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Pengelolaan pengembangan desa diperlukan hubungan kerja pemerintah terkecil dan terdekat yaitu pemerintah desa sebagai penunjang administrasi dan pelaku wisata di dalamnya. Peran setiap aktor yang terlibat sangat diperlukan sesuai dengan tugas dan saling berkoordinasi namun dalam perencanaan pengembangan Desa Wisata Benowo terhalang oleh masa pandemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia. Sehingga, pada tahun 2021 rencana tersebut baru mulai digagas kembali.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengembangan kemitraan dengan fokus peran multi *stakeholder*, pola kerja sama antar *stakeholder* dan dampak COVID-19 dalam pengelolaan Desa Wisata Benowo. Upaya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori pembagian dan peran *stakeholder* serta pola kemitraan. Peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam kepada informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat peran yang dimiliki oleh multi *stakeholder* dalam pengembangan ini yaitu peran *policy creator*, koordinator, *implementer*, dan fasilitator. Setiap satu peran tersebut dapat dimiliki oleh beberapa *stakeholder* sekaligus. Selain itu, pola kemitraan dalam pengembangan Desa Wisata Benowo ditemukan merupakan pola atau model kerja sama mutualistik. Pola kemitraan dengan saling memberikan manfaat dan bersama mencapai tujuan akhir keberhasilan pengembangan wisata bersama. Faktor-faktor sebagai penghambat para *stakeholder* dalam upaya mengembangkan Desa Wisata Benowo yaitu terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya semangat masyarakat desa, sarana dan prasarana keamanan akses, hubungan pokdarwis dan BUMDES, dan terbatasnya anggaran. Dalam masa pandemi COVID-19 Desa Wisata Benowo mengalami vakum yang cukup lama. Namun, para *stakeholder* mengambil keputusan dengan memberikan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan di Desa Benowo.

Kata Kunci: Peran Multi *Stakeholder*, Kemitraan, Pengembangan Desa Wisata

Abstract

Village development management requires the smallest and closest government work relationship, namely the village government as administrative support and tourism actors in it. The role of each actor involved is necessary by their duties and coordinating with each other, but in planning for the development of the Benowo Tourism Village, it is hindered by the COVID-19 pandemic which is spreading in Indonesia. So, in 2021 the plan has just begun to be re-initiated.

The research aims to discover how to develop partnerships with a focus on the role of multi-stakeholders, patterns of cooperation between stakeholders and the impact of COVID-19 in the management of Benowo Tourism Village. Efforts to answer the problems and research objectives are carried out using the theory of sharing and the role of stakeholders and partnership patterns. Researchers used a qualitative approach research method with data collection techniques, namely documentation, observation, and in-depth interviews with informants.

The results of the study show that there are four roles that multi-stakeholders have in this development, namely the roles of policy creator, coordinator, implementer, and facilitator. Each of these roles can be owned by several stakeholders at once. In addition, the partnership pattern in the development of the Benowo Tourism Village was found to be a pattern or model of mutualistic cooperation. The partnership pattern provides mutual benefits and together achieves the ultimate goal of successful joint tourism development.

Factors constraining stakeholders in efforts to develop Benowo Tourism Village are limited human resources, lack of village community enthusiasm, access to security facilities and infrastructure, Pokdarwis and BUMDES relations, and limited budgets. During the COVID-19 pandemic, Benowo Tourism Village experienced a long vacuum. However, the stakeholders decided to provide outreach, training, and mentoring in Benowo Village.

Keywords: Multi Stakeholder Role, Partnership, Tourism Village Development

**) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

****) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

PENDAHULUAN

Desa wisata memiliki konsep tersendiri tidak bisa disamakan dengan konsep wisata lainnya. Terdapat dua konsep utama dalam desa wisata yaitu akomodasi dan atraksi (Pratiwi, 2008). Akomodasi merupakan konsep desa wisata dengan menyediakan tempat tinggal penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk sebagai tempat tinggal wisatawan. Sedangkan atraksi adalah konsep desa wisata dengan menyuguhkan seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta pengaturan fisik lokasi desa yang memungkinkan bercampurnya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti kursus, dll. Selain itu, konsep desa wisata menurut Widi Kurniawan (2005) merupakan suatu bentuk pariwisata dengan objek dan daya tarik wisata berupa kehidupan desa dengan keistimewaan masyarakat, panorama alam, hasil budaya, sehingga dapat dijadikan komoditas bagi wisatawan. Hasil ekonomi dari desa wisata dapat menjadi salah satu peluang sumber pendapatan bagi masyarakat daerah tersebut yang mana berusaha mengelola sebagaimana mungkin potensi yang dimiliki. Berdasarkan Statistik Potensi

Desa 2018, Kemendesa PDTTIndonesia memiliki jumlah total 7.275 desa wisata yang tersebar di seluruh provinsi. Dari total tersebut, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan desa wisata terbanyak melebihi 1000 tempat (Oktari, 2021).

Desa wisata dikelola dengan berbagai upaya dan strategi yaitu pemetaan lingkungan dari segi potensi desa, pemberdayaan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi wisata dan dukungan pemerintah. Terdapat hubungan sinergis yang diciptakan oleh unsur swasta, pemerintah dan masyarakat yaitu:

- a. pemerintah sebagai fasilitator dan regulator;
- b. swasta sebagai pengembang; dan
- c. masyarakat sebagai subjek pengembang.

Dari hubungan tersebut bertujuan untuk pengembangan desa wisata tersebut. Pengembangan desa wisata menurut pasal 16 Peraturan Daerah Jateng no 2 tahun 2019 meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur desa wisata;
- b. pemasaran desa wisata;
- c. penguatan kelembagaan desa wisata; dan
- d. kerjasama kemitraan.

Dalam hal kegiatan pengembangan desa wisata disesuaikan dengan potensi yang dimiliki desa tersebut. Menurut Putra (2006), pengembangan desa wisata adalah wilayah desa yang dapat memanfaatkan unsur masyarakat desa dan berfungsi sebagai atribut produk wisata, menjadi suatu rangkaian aktivitas pariwisata yang terpadu serta memiliki tema. Potensi-potensi desa perlu digali dan dijadikan menjadi daya tarik dari segala sisi yang ada. Salah satu potensi yang perlu digali yaitu potensi alam yang dimiliki dengan dimanfaatkan sebaik mungkin. Terlepas dari kekuatan bisnis yang diperoleh, lingkungan perlu ditata sedemikian rupa agar tidak merusak tata alam itu sendiri serta tata sosial masyarakat setempat. Terkait dengan pengembangan wisata, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memiliki program pengembangan secara menyeluruh di daerah kawasan wisata Borobudur yang merupakan kawasan daerah dengan berbagai potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai daya guna daerah. Program tersebut direalisasikan dengan pembentukan sebuah lembaga yaitu Badan Otorita Borobudur atau yang sering dikenal dengan BOB.

BOB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2017. BOB merupakan satuan kerja dibawah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata nomor 10 Tahun 2017. BOB dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pariwisata khususnya di kawasan Borobudur dan sekitarnya. BOB mengembangkan Zona Otorita.

Zona Otorita Badan Otorita Borobudur yaitu kawasan hutan seluas 309 hektar yang berlokasi di Perbukitan Menoreh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Zona otorita ini berjarak 35 Km dari Bandara Internasional Yogyakarta dan dapat ditempuh selama 45 menit. Kawasan tersebut berdasarkan rencana akan dikembangkan dengan konsep *culture and Adventure Eco-Tourism*, dengan mengembangkan aspek kelestarian dan keramahan pada alam. Zona Otorita tersebut akan dibangun dengan menyediakan berbagai fasilitas wisata bertaraf Internasional, seperti hotel dengan konsep *Glamorous Camping, Eco Resort, Fine Dinning Restaurant, MICE*, dan didukung dengan kawasan di sekitarnya yang sudah mulai berkembang, sehingga dapat meningkatkan nilai investasi di

Zona Otorita Badan Otorita Borobudur (bob.kemenparekraf.go.id).

Cakupan BOB daerah Purworejo salah satunya yaitu Desa Benowo. Desa Benowo, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo memiliki potensi alam yang sangat menjanjikan untuk dimanfaatkan. Selain alam, budaya religi dan kuliner juga dapat ditemukan di Desa Benowo ini. Dari potensi tersebut dapat dikatakan bahwa Desa Benowo memiliki paket yang cukup lengkap menjadi salah satu desa wisata. Desa Benowo sudah beralih menjadi desa wisata. Perubahan tersebut ditilik dari perkembangan potensi alam yang ada yaitu gunung kunir dan curug. Daya tarik wisata alam tersebut mulai ramai sejak tahun 2016 hingga tahun 2017. Pengunjung dikisarkan hingga ribuan pada kala itu. Kuliner tradisional dan kopi khas benowo juga menjadi salah satu poin daya tarik lainnya. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Purworejo memutuskan untuk menjadikan Desa Benowo menjadi Desa Wisata pada tahun 2017 tersebut. Akan tetapi, peralihan tersebut tidak diikuti dengan sosialisasi, pelatihan, dan lainnya, yang mana hal tersebut merupakan salah satu penyokong dasar pengembangan suatu

desa wisata. Peran utama masyarakat tidak bisa dilupakan, pemerintah tidak hanya bekerja sendiri tanpa adanya campur tangan masyarakat yang mana pada dasarnya merupakan aktor utama dari proses dan hasil keberhasilan nantinya. Akibat dari hal tersebut terbukti dengan adanya penurunan pengunjung yang pada awalnya mencapai ribuan menjadi lambat laun menurun. Tidak adanya inovasi, wisata yang cenderung monoton memberikan kepuasan satu kali pada pengunjung dan meberikan kesan untuk tidak kembali menikmati wisata monoton tersebut. Pola pikir pengunjung yang seperti itu telah mematikan keberlangsungan pengelolaan wisata. Hal tersebut diperparah dengan tidak didukungnya akses jalan yang memadai dan disinyalir sudah ada beberapa kasus kecelakaan akibat infrastruktur yang tidak memadai.

Desa wisata yang kurang dikelola dengan konsep yang benar dan strategis mengakibatkan tidak adanya perkembangan di dalamnya terlepas dari banyaknya potensi yang ada. Setelah penurunan SK, pelatihan dan pengelolaan manajemen wisata benowo mulai digagas secara mendasar. Perencanaan tersebut tetapi terhalang

oleh masa pandemi corona yang menyebar di Indonesia. Sehingga, pada tahun 2021 rencana tersebut baru mulai digagas kembali. Pengelolaan pengembangan desa wisata ini bekerja sama dengan Badan Otoritas Borubudur yang mencakup potensi alam dan bisnis berupa *homestay* dan penunjang pariwisata lainnya.

Pengelolaan pengembangan desa diperlukan hubungan kerja pemerintah terkecil dan terdekat yaitu pemerintah desa sebagai penunjang administrasi dan pelaku wisata di dalamnya. Peran setiap aktor yang terlibat sangat diperlukan sesuai dengan tugas dan saling berkoordinasi. Hal tersebut jika tidak dilakukan secara matang dapat menjadi salah satu hambatan dalam proses pengelolaan dan pengembangan desa wisata ini terlebih dalam pendekatan dan penggerakan masyarakat.

Berkaitan pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan dari segi kerja sama atau kemitraan antar aktor yang terlibat. Hubungan organisasional dengan bentuk hubungan kemitraan menurut adalah bentuk hubungan dengan pihak pertama dan kedua setara yang mana kedua pihak tersebut saling bertumpu

pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Dilihat dari berbagai temuan unik dan permasalahan yang ada, menarik untuk dilihat dan lebih digali mengenai peran setiap *stakeholder* dalam pengembangan yang diambil. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil fokus mengenai bagaimana peran multi *stakeholder* dalam pengembangan kemitraan Desa Wisata Benowo. Pemilihan topik dikarenakan kompleksitas menarik yang ditemukan dari segi peran kemitraan dan dampak pandemi COVID-19.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan kemitraan dengan fokus peran multi *stakeholder*, pola kerja sama antar *stakeholder* dan dampak COVID-19 dalam pengelolaan Desa Wisata Benowo.

KERANGKA TEORI

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Stakeholder dibagi menjadi tiga kelompok (Maryono et al.2005) dalam penelitian (Yosevita: 25), antara lain:

a. *Stakeholder* primer

Stakeholder primer merupakan *stakeholder* yang secara langsung mendapatkan dampak dari suatu rencana baik positif maupun negatif serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. *Stakeholder* primer memiliki pengaruh dan kepentingan dan harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan yang direncanakan.

b. *Stakeholder* kunci

Stakeholder kunci merupakan *stakeholder* yang memiliki kewenangan legal dalam pengambilan keputusan. Berkaitan dalam penelitian ini *stakeholder* kunci adalah *stakeholder* yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata Kabupaten Purworejo.

c. *Stakeholder* sekunder atau pendukung

Stakeholder pendukung merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan langsung tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholder* pendukung berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan menjadi fasilitator dalam proses pengembangan suatu kegiatan. *Stakeholder* pendukung meliputi para investor atau pihak swasta, LSM,

peneliti dan lain sebagainya yang memiliki peran sebagai pendukung dalam kegiatan.

Teori Peran

a. *Policy creator*

Policy creator sesuai dengan namanya merupakan salah satu peran *stakeholder* sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. *Stakeholder* dengan peran *policy creator* memiliki pengaruh paling utama dalam penentu arah awal mana yang membutuhkan pembangunan atau perkembangan. Dengan peran ini *stakeholder* tersebut membuat kebijakan atau peraturan berkaitan dengan peraturan wisata.

b. Koordinator

Dalam peran koordinator, *stakeholder* memiliki peran mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat dalam kegiatan. Koordinasi dalam konteks peran *stakeholder* adalah bagaimana mengelola relasi dan interaksi antar *stakeholder* guna mencapai tujuan serta menyeimbangkan kepentingan masing-masing pihak sehingga akan meminimalisir munculnya konflik (Freeman, 1984). *Stakeholder* bisa dikategorikan memiliki peran sebagai koordinator jika mereka berinteraksi

dan berkomunikasi dalam hal arahan pengelolaan program atau kegiatan bersama dengan pihak-pihak lain yang terlibat. Koordinasi dilakukan untuk mencapai keselarasan informasi dan sebagai salah satu forum diskusi antar *stakeholder* sehingga dapat bersama melakukan pengembangan program sesuai tujuan output yang diinginkan secara efisien, efektif, dan tanpa konflik berarti.

c. Fasilitator

Sebagai fasilitator, *stakeholder* memiliki peran untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Kebutuhan dalam pengembangan suatu program tidak dapat dipenuhi hanya dengan satu aktor atau *stakeholder* saja, namun juga bisa dipenuhi oleh *stakeholder* lain. Satu *stakeholder* bisa hanya memiliki peran sebagai fasilitator saja sesuai cakupannya. *Stakeholder* bisa dikategorikan sebagai fasilitator dalam suatu program atau kegiatan jika berperan aktif dalam memberikan penunjang kebutuhan kegiatan. Penunjang kebutuhan dapat berupa fasilitas fisik ataupun non-fisik seperti jasa atau tenaga.

d. *Implementer*

Sesuai dengan namanya, *implementer* adalah peran *stakeholder* sebagai pelaksana kebijakan yang di dalamnya juga termasuk kelompok sasaran. Dalam peran ini, *stakeholder* melaksanakan atau mengeksekusi segala rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Kelompok sasaran atau dalam penelitian ini yaitu masyarakat juga dapat termasuk *stakeholder* dengan peran *implementer* karena segala rencana yang terealisasi pastinya akan dilaksanakan dan diteruskan oleh kelompok yang dijadikan sasaran dalam program atau kegiatan.

e. Akselerator

Stakeholder yang memiliki peran mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran baik dilihat dari segi waktu ataupun tujuan. Dalam peran ini *stakeholder* juga dapat disebut sebagai pengarah dan pengevaluasi kegiatan. Peran ini terkadang tidak dimiliki secara pasti oleh siapa namun bisa mengalir sejalan kegiatan.

Teori Pola Kemitraan

Menurut Sulistiyani (2004:130-131) terdapat model kemitraan yang mampu menggambarkan hubungan

antarorganisasi berdasarkan kesadaran para pelaku, yaitu:

1) *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu

Pola kemitraan semu adalah merupakan sebuah pola kemitraan antara dua pihak atau lebih. Namun antar *stakeholder* tidak sesungguhnya melakukan kerja sama secara seimbang. Pada lain sisi suatu pihak kemungkinan belum sepenuhnya memahami arti dari persekutuan yang dibentuk, dan untuk tujuan apa. Terdapat hal unik dari kerja sama ini yaitu kedua belah pihak atau lebih merasa perlu untuk bekerjasama, tetapi para mitra belum tentu mengerti hakikat apa yang diperjuangkan dan apa kepentingannya.

Dapat disimpulkan dan didudukkan kembali bahwa dalam kemitraan ini, para *stakeholder* mendapatkan manfaat dari pengembangan pariwisata tanpa memberikan dampak signifikan pada pihak lain. *Stakeholder* mendapat manfaat dari peningkatan pariwisata tanpa memberikan kontribusi aktif pada pembangunan desa wisata. Pola relasi tersebut dapat dilihat dalam proses pengembangan suatu kegiatan atau program, sama halnya dengan program pengembangan desa wisata. Tidak

semua *stakeholder* memiliki peran aktif namun juga mendapat manfaat dari desa wisata. Diperlukan analisis mengenai para *stakeholder* yang memiliki kontribusi aktif dan tidak sehingga menemukan pola kemitraan ini.

2) *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik.

Pola kemitraan yang kedua yaitu kemitraan mutualistik. Kemitraan ini adalah merupakan pola kemitraan antar dua pihak atau lebih yang saling menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan. Aspek tersebut yaitu untuk saling memberikan manfaat serta saling mendapatkan manfaat lebih dari kemitraan tersebut, sehingga diharapkan akan dapat mencapai tujuan secara optimal

Dalam pengembangan desa wisata, kemitraan mutualistik mencerminkan hubungan simbiosis yang saling menguntungkan antara berbagai pihak. Para *stakeholder* memberikan kontribusi positif satu sama lain dalam kegiatan pengembangan desa wisata. Kontribusi positif tersebut dapat berupa peran aktif para *stakeholder* seperti halnya, memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada kelompok sasaran dimana pelatihan tersebut secara langsung

memberi manfaat kepada kelompok sasaran tersebut, namun juga di lain sisi memberikan manfaat pada si pemberi pelatihan dengan tujuan yang terlaksana dan output yang dihasilkan. Dapat didudukkan secara lebih detail bahwa kemitraan mutualistik dalam pengembangan desa wisata dapat dilihat dari kontribusi antar *stakeholder* dalam mengembangkan infrastruktur, pelatihan, atau promosi desa wisata.

3) *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

Kemitraan konjugasi adalah pola kemitraan untuk mendapatkan energi bersama dari para aktor mitra dan kemudian saling terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Kemitraan konjugasi dapat merujuk pada pertukaran pengetahuan, keterampilan atau sumber daya antara pemangku kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, organisasi, agen, kelompok atau individu yang memiliki kelemahan dalam menjalankan bisnis atau mencapai tujuan organisasi dapat mengadopsi model kerjasama ini. Dua pihak atau lebih dapat bergabung atau melakukan konjugasi untuk

meningkatkan kemampuan satu sama lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam kepada informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan wawancara dilakukan kepada kelompok utama yang peneliti pilih. Teknik wawancara semi terstruktur sebagaimana penjelasan Sugiyono (2019) merupakan suatu teknik wawancara yang tidak melulu mengikuti pedoman wawancara yang sudah dibuat melainkan juga mencari pendapat dan ide-ide dari sang informan.

Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Menjadi anggota atau bagian dari instansi atau organisasi terkait kemitraan dengan program pengembangan Desa Wisata Benowo.
2. Terlibat dalam proses pengembangan desa wisata
3. Memiliki waktu yang cukup dan berkenan untuk diwawancara

Dari kriteria tersebut, peneliti berusaha menentukan informan yang sesuai dan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Dalam menentukan berapa jumlah informan, disesuaikan dengan dua asas atau syarat dalam menentukan jumlah informan yaitu asas kecukupan dan kesesuaian data (Martha & Kresno, 2016). Asas kecukupan bertolak pada sudah terjawabnya pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan dan sudah mencapai kedalaman informasi yang diinginkan peneliti. Artinya bahwa jika dari berapa informan saja sudah cukup mewakili jawaban, maka jumlah informan sudah dicukupkan dan dinilai sudah terwakilkan. Asas kesesuaian memiliki makna bahwa informan yang dipilih harus memiliki kesesuaian dengan kehendak maksud dari penelitian dan dapat menjawab secara jelas tidak menimbulkan perbedaan jawaban antara informan satu dan yang lainnya yang mana dapat menimbulkan kerancuan dan pertanyaan kesesuaian data tersebut.

Berikut batasan informan yang sesuai dengan kriteria dan asas penentuan jumlah informan:

- Masyarakat desa (pokdarwis), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pokdarwis Desa Benowo.

- Pemerintah Desa Benowo, dalam hal ini diwakili oleh Kaur Perencanaan Desa Benowo.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Purworejo, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Promosi.
- Badan Otorita Borobudur (BOB), dalam hal ini diwakili oleh Direktur utama Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata.
- TNI, dalam hal ini diwakili oleh anggota KODIM yang berkontribusi dalam kegiatan TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) di Desa Benowo.
- Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Desa Benowo.

Sumber data penelitian kualitatif ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan teknik penganalisisan data dengan tahap reduksi data, proses penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Peran *Stakeholder*

Policy creator

Stakeholder dengan peran *policy creator* memiliki pengaruh paling utama dalam penentu arah awal mana yang membutuhkan pembangunan atau perkembangan. Dengan peran ini *stakeholder* tersebut membuat kebijakan atau peraturan berkaitan dengan peraturan wisata.

Peran *policy creator* dalam penelitian ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BOB dengan MOU terkait pengembangan bersama desa wisata - desa wisata sasaran. BOB disini sebagai *stakeholder* yang berperan memetakan wilayah yang dibutuhkan menjadi zona otorita cakupan wilayah pengembangan dari BOB. Dalam konteks hanya pengembangan wisata, maka pemerintah daerah yang berperan penting dalam *policy creator* ini. Namun, dalam konteks pengembangan Desa Wisata Benowo yang menjadi salah satu sasaran pengembangan BOB dalam zona otoritanya maka BOB juga merupakan salah satu *stakeholder* yang memiliki peran sebagai *policy creator*. BOB memiliki peraturan dan kebijakan

menentukan arah pengembangan sesuai dengan rencananya yang disebut dengan *master plan* BOB.

Sedangkan untuk pemerintah daerah memiliki peran membuat peraturan secara umum yang kemudian diturunkan tugas kepada dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata Kabupaten Purworejo. Peraturan berkaitan dari aspek pengembangan hingga anggaran yang selanjutnya diimplementasikan diturunkan kepada Dinporapar Purworejo.

Dalam pelaksanaan peran ini menurut hasil observasi, peneliti melihat sudah adanya kejelasan peran *stakeholder* dalam mewujudkan dan melaksanakan peran sebagai *policy creator* ini. Adanya MOU dituangkan langsung pada kerja sama BOB dengan Pemerintah Daerah. Namun, peneliti hanya bisa mendapatkan penjelasan tanpa bisa melihat MOU tersebut dikarenakan penolakan akses dari pihak instansi. Akan tetapi, dari penjelasan di atas peneliti cukup mendapatkan informasi mengenai MOU tersebut.

Koordinator

A. Badan Otorita Borobudur (BOB)

Badan Otorita Borobudur merupakan satuan kerja di bawah Kemenparekraf yang mana memiliki

dua tugas yaitu tugas koordinatif dan tugas berkaitan dengan zona otorita borobudur. Sebagai koordinator, BOB mengkoordinasi serta menjalin komunikasi dengan *stakeholder* lain yang terlibat. BOB turut aktif mengkoordinasi kegiatan pengembangan pariwisata dalam zona otorita. Kegiatan pengembangan setiap wilayah yang termasuk dalam zona otorita menjadi tanggung jawab tugas BOB sebagai koordinator demi pengkondisian kerja sama yang baik dan terarah antar *stakeholder* sehingga mengurangi ketidakefisienan serta blunder. BOB merancang koordinasi pertemuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan bersama oleh para *stakeholder* dalam program pengembangan wisata ini.

BOB melakukan koordinasi dengan *stakeholder* lain yaitu pemerintahan desa, BUMDES, pokdarwis, perhutani, dan dinporapar. Koordinasi dilakukan melalui rapat dan kunjungan di Desa Benowo dengan perancangan master plan BOB, dll. Tugas koordinasi tertuang dalam Peraturan Presiden no 46 tahun 2017. BOB dalam program pelaksanaannya mengacu pada rancangan atau yang juga disebut sebagai master plan BOB. Desa

Benowo memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata gastronomi.

B. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo

Dinporapar berperan sebagai koordinator dengan aktif mengkoordinasi antar *stakeholder* terkait. Dinporapar melaksanakan forum group discussion antar *stakeholder*. Rapat dilaksanakan sebagai tempat koordinasi bersama berkaitan pengelolaan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik.

Pada peran ini, Dinporapar memiliki lingkup yang lebih spesifik langsung terhadap desa dan menghubungkan dengan kebutuhan secara administratif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Berdasarkan analisis peneliti, peran BOB dalam koordinator mencakup tugas secara luas dari berbagai aspek pengembangan dengan berbagai aktor lainnya. Namun, untuk peran Dinporapar disini disimpulkan berkorelasi dengan BOB akan tetapi lebih spesifik dan menjalin hubungan secara langsung secara administratif sebagai Desa di Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu, dalam koordinasinya

dimulai dari awal sebelum pembentukan sebagai desa wisata terjadi. Dinporapar juga berkoordinasi dalam mengolah potensi desa yang dapat diunggulkan.

C. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa melaksanakan rapat koordinasi dengan pokdarwis, BUMDES, dan pelaku wisata lainnya. Sesuai dengan pernyataan Bapak Mushtofa, bahwa ada frekuensi pertemuan antar pelaku wisata di internal desa. Pertemuan dilakukan setidaknya satu kali dalam satu bulan. Pemerintah berusaha menggerakkan masyarakat untuk melek dalam pentingnya pengelolaan pengembangan desa wisata di wilayah pedesaan mereka.

Implementer

A. Warga Desa

Warga desa sebagai *stakeholder* primer berperan sebagai pelaksana atau *implementer* dalam pengembangan Desa Wisata Benowo. Konsep desa wisata mengusung budaya, keindahan alam, dan segala sesuatu yang ada pada kehidupan di desa. Oleh karena itu, secara tidak langsung kehidupan warga desa juga menjadi objek desa wisata. Warga terlibat langsung dalam

pengembangan wisata baik dalam masa pembangunan ataupun pengelolaan.

Sebagai pelaksana pengembangan, warga desa mempunyai peranan langsung dalam penyediaan lahan, tenaga, dan inovasi kreativitas. Warga desa bekerja sama menambah keterampilan sebagai contoh keterampilan pembuatan kopi sehingga menjadi salah satu produk unggulan kuliner desa. Akomodasi lainnya juga berupa *homestay*.

Dilihat dari situasi di Desa Benowo, hingga tahun 2022 hanya memiliki 10 *homestay*. *Homestay* tersebut pun diketahui belum dimaksimalkan secara penuh. Hal tersebut dikarenakan menurunnya pengunjung dan belum siapnya desa untuk menerima pengunjung pada saat ini. Dari tahun awal COVID-19 yaitu sekitar 2020 hingga saat ini, desa tidak menerima pengunjung sama sekali. Pengunjung hanya sesekali secara liar. Hal tersebut dikarenakan berhentinya pengelolaan secara langsung pada masa pandemi. Sehingga, infrastruktur dasar yang merupakan penunjang wisata tidak terbangun dan menjadikan desa wisata ini belum dikatakan layak untuk berani menerima pengunjung secara *massive* dan promosi ke publik.

Pada masa pandemi COVID-19, warga desa terlibat langsung dalam sosialisasi dan menjadi target sasaran dalam peningkatan keterampilan sebagai salah satu upaya keahlian menciptakan inovasi dalam bentuk produk, pengelolaan, dll. Warga desa juga berperan aktif tergabung dalam pokdarwis. Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut menunjukkan peran masyarakat sebagai pelaksana dalam pengembangan desa wisata yang mempunyai peran secara langsung dalam berinteraksi dengan pengunjung serta secara inventaris fisik yaitu lahan wisata dan tenaga bersama dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti simpulkan bahwa semangat dan kesadaran masyarakat disini kembali ditekankan sebagai salah satu poin penting pengembangan desa wisata yang mempengaruhi pelaksanaan. Pengembangan akan sulit berkembang dan para *stakeholder* akan sulit untuk bergerak menjadi fasilitator jika masyarakat sendiri yang sebagai aktor utama *implementer* tidak ada hasrat semangat keinginan dan kesadaran untuk berubah. Pengaruh lainnya juga disebabkan oleh

vakumnya wisata sebagai akibat adanya COVID-19.

B. Badan Otorita Borobudur (BOB)

Peran *implementer* merupakan salah satu peran yang melekat pada BOB dalam pengembangan wisata ini. Selain koordinator BOB juga berperan dalam melaksanakan program atau kebijakan yang dirancang dengan kelompok sasaran yaitu Desa Benowo. Dalam konteks tersebut, BOB bekerja sama dengan Dinporapar memberdayakan masyarakat desa dengan melakukan pelatihan dan studi banding wisata. BOB juga bertugas memetakan, mengkonsep bagaimana pembangunan langsung di lokasi. Kegiatan tersebut berlangsung selama COVID-19. Pandemi tidak menjadi halangan. Hanya saja, intensitas pertemuan secara langsung terkadang digantikan dengan pertemuan secara online.

C. Dinporapar

Selain koordinator, Dinporapar juga berperan sebagai *implementer* dengan berperan melaksanakan pemberdayaan warga desa terutama pokdarwis dan BUMDES. Pokdarwis Benowo diketahui terbentuk lebih dulu dibandingkan dengan BUMDES. Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak

Pujiono sebagai berikut bahwa BUMDES belum lama ini terbentuk, sehingga pokdarwis yang sudah terbentuk terlebih dahulu tidak mau untuk bergabung BUMDES namun berdiri sendiri. Sampai saat ini, pokdarwis dan BUMDES sudah saling besinergi bersama di tahap pengembangan awal sekarang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Dinporapar berusaha melakukan pemberdayaan berkaitan dengan aspek kelembagaan dalam kelancaran secara administrasi. Pemberdayaan dilakukan sebagai implementasi terwujudnya Desa Wisata Benowo.

D. Pemerintah Desa

Terdapat beberapa program pemberdayaan yang diimplementasikan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa. Program-program tersebut diantaranya Pelatihan membatik dan program ketahanan pangan dengan target sasaran anggota PKK. Ketahanan pangan yang sudah dilaksanakan yaitu berupa penanaman sayuran di pekarangan rumah setiap warga.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat implementasi pemberdayaan masyarakat terutama ketahanan pangan. Ketahanan pangan masih dalam tahap skala kecil dan tahap membentuk

kebiasaan menanam sayuran sebagai bentuk kemandirian pangan masing-masing keluarga. Pemerintah Desa mendampingi dan berperan secara langsung dalam pelaksanaan atau implementasi pemberdayaan kepada masyarakat. Pelaksanaan tercatat cukup berhasil sebagai bentuk peningkatan keterampilan masyarakat.

Dapat disimpulkan, dalam peran *implementer* ini Pemerintah Desa sebagai instansi yang paling dekat dengan masyarakat berusaha membangun masyarakat yang berdaya dengan pendampingan secara intensif yang mana tidak dilaksanakan oleh *stakeholder* lain yang memiliki peran yang sama. Hal tersebut dipengaruhi oleh kedekatan dan perasaan tanggung jawab membangun desa untuk kesejahteraan masyarakat bersama.

Fasilitator

A. Badan Otorita Borobudur (BOB)

BOB berperan dalam mencukupi kebutuhan dalam beberapa hal diantaranya, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan keterampilan warga dengan sosialisasi materi yang dibutuhkan, dan melakukan kegiatan promosi. BOB dalam proses pengembangan selain mengkoordinir dan melaksanakan dengan terjun

langsung ke lapangan juga berperan memfasilitasi sebagai pendukung dalam pengembangan. Sebagai pendukung, BOB memberikan pengetahuan dan pendampingan yang dikerjasamakan dengan beberapa pihak. Fasilitas pendukung diberikan sebagai bekal masyarakat kelompok sasaran yang berguna dalam pengelolaan kedepannya.

Dapat disimpulkan bahwa, peran fasilitator yang dimiliki oleh BOB ini lebih luas jika dibandingkan dengan *stakeholder* lainnya. BOB memiliki koneksi dan wewenang untuk melaksanakan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* baik itu dari instansi pemerintahan ataupun swasta. BOB mengerahkan usaha untuk mengembangkan Desa Benowo untuk layak menjadi Desa Wisata penyanggahan otorita yang kemudian dapat berdikari serta menarik investor dalam berbisnis.

B. Dinporapar

Dinporapar berperan dalam mencukupi kebutuhan dalam beberapa hal diantaranya, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan keterampilan warga dengan sosialisasi materi yang dibutuhkan, dan melakukan kegiatan promosi.

Peran Dinporapar memfasilitasi pembangunan mck, pengairan, gazebo, dll. Pembangunan masih dalam tahap. Untuk mck dan pengairan sudah berhasil dibangun. Gazebo sudah pernah dibangun namun sudah cukup tidak layak untuk sekarang dikarenakan waktu vakum.

Selain itu juga ada pelatihan promosi dan sosialisasi dari Dinporapar kepada Desa Wisata Benowo sesuai dengan pernyataan Kabid Promosi Dinporapar. Dinas terutama pada bidang promosi terus gencar memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait desa wisata. Selain itu juga pada bidang penataannya. Dinas juga bekerja sama dalam pengadaan mck. Menurut Bapak Musthofa aspek kerja sama yang dilakukan dinas yaitu memetakan tata ruang sadar wisata, dan menciptakan kemandirian masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati bahwa peran Dinporapar dalam pengembangan desa wisata juga cukup dominan dengan peran fasilitatornya. Dinas memberikan fasilitas dan pendukung secara lebih dalam. Dinas berusaha mendukung kemandirian masyarakat lebih intens dan promosi secara berkala sesuai tupoksinya.

C. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa berperan menjadi jalan penghubung pergerakan warga dalam pengelolaan wisata. Jalan penghubung dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan promosi branding wisata. Dalam hal ini, branding masih sangat sedikit dan bahkan dapat dikatakan tidak ada. Sampai saat ini belum ada media sosial atau berbagai media promosi lainnya yang berfungsi sebagai branding desa wisata ke masyarakat luas atau calon wisatawan.

D. TNI

Akses jalan untuk menuju ke destinasi Desa Wisata Benowo ada dua. Akses yang pertama yaitu melewati desa yang masih satu kecamatan dengan benowo yaitu Kecamatan Bener dan akses yang kedua yaitu akses dengan melewati desa di kecamatan yang berbeda yaitu Kecamatan Loano. Kedua akses tersebut dapat dilewati dan berfungsi sebagai akses umum untuk menuju benowo. Namun, kedua akses jalan tersebut tidak cukup bagus sebagai penunjang akses jalan transportasi wisata. Ada beberapa kasus kecelakaan yang terjadi kepada wisatawan yang akan berkunjung atau akan pulang dari wisata. Kecelakaan

jatuh dari motor karena rem blong, patah tulang, lecet-lecet, dll.

TNI sebagai instansi keamanan negara memiliki salah satu program yang bertujuan dalam percepatan pembangunan yaitu program TMMD. Kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) merupakan integrasi antara TNI dengan pemerintah daerah untuk mendorong terobosan pembangunan di pedesaan sekaligus sebagai langkah perbaikan infrastruktur dan peningkatan taraf hidup masyarakat. TMMD membantu proses perbaikan akses jalan sepanjang 1800 m untuk mengurangi angka kecelakaan karena akses jalan yang ekstrim. Koordinasi TMMD akan berlangsung pada 2023 selesai target perbaikan.

Perbaikan akses jalan yang dilakukan bersama TNI dengan program TMMD tersebut membuktikan salah satu peran TNI *stakeholder* sekunder dalam pengembangan Desa Wisata Benowo yaitu berperan sebagai fasilitator. Sesuai pendapat Nugroho, *stakeholder* sebagai fasilitator memiliki peran untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. TNI berperan memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan desa dalam hal perbaikan akses jalan.

E. Perhutani

Dalam hal ini Perhutani dan BOB bekerjasama dengan MOU pembagian tanah untuk pariwisata sebanyak 1:3 bagian tanah. Tanah tersebut sebagian besar termasuk dalam wilayah Desa Benowo. Oleh karena itu, Desa Benowo menjadi salah satu desa penyangga lahan otorita borobudur yang dikelola oleh BOB.

Pola Kemitraan

Saling Memberi Manfaat

Peneliti melihat dalam rangka menjalin hubungan kemitraan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan, para *stakeholder* pengembangan desa wisata dapat melakukan beberapa hal diantaranya,

1. Pemerintah Desa membuat program yang memberi manfaat kepada para masyarakat dalam mengembangkan desa wisata.
2. Instansi pemerintah memberikan fasilitas dalam rangka meningkatkan keterampilan dan pengetahuan warga masyarakat dalam pengelolaan desa wisata.
3. Instansi pemerintah melakukan koordinasi tinjauan pelaksanaan

Kontribusi Aktif

Pelatihan dan sosialisasi merupakan salah satu bentuk kontribusi positif dari para *stakeholder* dalam usaha pengembangan Desa Wisata Benowo ini. Peran aktif dari para *stakeholder* dalam pengadaan pelatihan-pelatihan penunjang pengelolaan desa wisata memberikan manfaat terutama kepada kelompok sasaran. Kelompok sasaran merupakan pelaku wisata masyarakat Desa Benowo. Masyarakat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk pengelolaan wisata.

Kontribusi positif berupa pelatihan dan sosialisasi yang diberikan para *stakeholder* memberikan manfaat positif kepada masyarakat desa yaitu menambah keterampilan baru bagi masyarakat dan membuka peluang ekonomi. Masyarakat desa mendapatkan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi dari para *stakeholder* terkait.

Kenaikan atau semakin bertambahnya kualitas masyarakat juga mempengaruhi kualitas dan inovasi produk yang dihasilkan. Hal tersebut juga otomatis membuka peluang ekonomi bagi masyarakat secara lebih tinggi dari sebelumnya.

Selain itu, ada kontribusi aktif *stakeholder* dalam mengembangkan infrastruktur. Manfaat yang didapat yaitu keuntungan kemudahan akses terutama akses secara fisik. Secara fisik jalan, akses menuju wisata benowo masih dalam tahap perbaikan yaitu meliputi jalan akses langsung jalan usaha tani, serta tempat-tempat penunjang wisata seperti mck dll. Bangunan secara fisik tersebut memberikan dampak positif dengan terpeliharanya aspek fisik desa dengan lebih baik dan menunjang kegiatan kehidupan kenyamanan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa;

1. *Stakeholder* yang terlibat di dalam pengembangan Desa Wisata Benowo terdiri dari *stakeholder* primer, kunci dan sekunder. Masyarakat Desa Benowo merupakan *stakeholder* primer yang memiliki pengaruh penting dan harus dilibatkan langsung dalam setiap tahapnya. Sebagai *stakeholder* primer, masyarakat Benowo mendapatkan dampak langsung dari adanya wisata tersebut baik secara positif maupun

negatif. *Stakeholder* Kunci meliputi Badan Otorita Borobudur (BOB), Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten (Dinporapar). *Stakeholder* sekunder meliputi TNI, dan Perhutani. *Stakeholder* sekunder sebagai penunjang pengembangan tidak memiliki kepentingan langsung terhadap rencana desa wisata namun memiliki kepedulian yang besar dalam proses pengembangan. *Stakeholder* dalam program pembangunan diklasifikasikan berdasarkan peranannya menjadi lima peranan. Dari lima peranan tersebut peneliti mendapatkan temuan bahwa dari setiap satu peran tersebut dapat dimiliki oleh beberapa *stakeholder* sekaligus. Yang pertama yaitu peran *policy creator*. Peran *policy creator* dalam penelitian ini dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah bekerja sama dengan BOB dengan MOU terkait pengembangan bersama desa wisata - desa wisata sasaran. Yang kedua yaitu peran koordinator, peran ini dimiliki oleh *stakeholder* kunci yaitu BOB, Dinporapar, dan Pemerintah Desa Benowo.

Stakeholder tersebut memiliki peran mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga yaitu peran *implementer*, peran ini dimiliki oleh *stakeholder* primer yaitu masyarakat dan *stakeholder* kunci yaitu, BOB, Dinporapar, dan Pemerintah Desa Benowo. Sebagai pelaksana pengembangan, warga desa mempunyai peranan langsung dalam penyediaan lahan, tenaga, dan inovasi kreativitas. Yang keempat yaitu peran fasilitator, peran ini dimiliki oleh *stakeholder* kunci yaitu, BOB, Dinporapar, dan Pemerintah Desa Benowo, serta *stakeholder* sekunder yaitu, TNI dan Perhutani. *Stakeholder* ini berperan sebagai fasilitator menyediakan keutuhan berupa sarana-dan prasarana.

Peneliti mendapatkan hasil bahwa peran yang dominan dan banyak dimiliki oleh *stakeholder* yaitu peran sebagai fasilitator. Peran *stakeholder* sebagai fasilitator dalam pengembangan kemitraan Desa Wisata Benowo terbukti dimiliki oleh lima *stakeholder*. *Stakeholder* sebagai fasilitator lebih banyak dibandingkan peran

stakeholder sebagai peran yang lainnya dikarenakan sebuah pengembangan kegiatan atau program dibutuhkan penunjang lebih banyak dari segi fisik maupun non fisik. Jika dilihat dari realita pengembangan desa wisata ini, peneliti melihat bahwa penunjang pengembangan wisata sangat mempengaruhi proses pengembangan. Hal tersebut dikarenakan proses pengembangan ini belumlah mencapai tahap tengah yang mana sudah bisa digerakkan oleh masyarakat secara mandiri dengan sedikit peran dari *stakeholder*. Tahap proses pengembangan ini masih sangatlah awal yang mana belum mencapai kemandirian sama sekali.

Terdapat peran yang tidak ditemukan dalam proses pengembangan ini yaitu peran akselerator. *Stakeholder* dengan peran akselerator sebenarnya cukup diperlukan dalam suatu proses pembangunan atau pengembangan, namun peran ini terkadang secara spesifik dimiliki oleh satu *stakeholder* dan terkadang pula tidak secara spesifik. Tidak adanya *stakeholder* yang memiliki peran

ini menjadikan pengembangan desa wisata tidak selesai atau tidak tercapai dengan waktu yang sesuai atau pas.

Mandeknya proses pengembangan terutama dikarenakan kesadaran masyarakat serta kemauan yang menggerakkan pengelolaan tidak terencana dan terealisasi dengan baik dimana tidak secara mudah prosesnya tidak hanya seperti yang digaungkan di awal saja.

2. Model kemitraan yang mampu menggambarkan hubungan antarorganisasi berdasarkan kesadaran para pelaku yaitu kemitraan mutualistik, kemitraan semu, dan kemitraan konjugasi. Berdasarkan teori tersebut disandarkan dengan kemitraan dalam pengembangan Desa Wisata Benowo ditemukan bahwa pola atau model kerja sama mutualistik. Pola kemitraan dengan saling memberikan manfaat dan memberikan kontribusi aktif bersama dalam mencapai tujuan akhir keberhasilan pengembangan wisata. Para *stakeholder* dalam pengembangan desa wisata saling memberikan manfaat dengan melaksanakan beberapa hal yaitu:

- Pemerintah Desa membuat program yang memberi manfaat kepada para masyarakat dalam mengembangkan desa wisata;
- Instansi pemerintah memberikan fasilitas dalam rangka meningkatkan keterampilan dan pengetahuan warga masyarakat dalam pengelolaan desa wisata; dan;
- Instansi pemerintah melakukan koordinasi tinjauan pelaksanaan.

Sedangkan kontribusi aktif para *stakeholder* diwujudkan dengan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan desa wisata. Selain itu, kontribusi aktif *stakeholder* juga dapat diwujudkan dalam mengembangkan infrastruktur penunjang wisata.

SARAN

Untuk memaksimalkan pengembangan kemitraan desa wisata, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Melibatkan setiap *stakeholder* sesuai porsi masing-masing dengan koordinasi terarah. Koordinasi dilakukan dengan frekuensi

pertemuan tetap. Sehingga bisa menjalin kesamaan informasi dan output yang dihasilkan sesuai dengan rencana. Selain itu, diperlukan penanaman peningkatan kesadaran wisata pada masyarakat demi menumbuhkan semangat sadar wisata. Semangat sadar wisata dalam masyarakat perlu ditingkatkan sehingga pengembangan wisata dapat berjalan. Masyarakat setempat memiliki peran pelaksana kunci sebagai *stakeholder* primer.

2. Hubungan kerja sama dengan membentuk pola kerja sama mutualistik merupakan pola yang sudah cukup baik dalam sebuah pengembangan atau pembangunan desa wisata. Kontribusi aktif setiap *stakeholder* perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan. Hal dasar yang sangat perlu dilakukan pada saat ini yaitu membuat akun media sosial sebagai media promosi dengan menarik. Promosi dapat memperluas desa dikenal oleh calon wisatawan nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Otorita Borobudur. (n.d.). *Zona Otorita Borobudur*. Retrieved from [bob.kemenparekraf.go.id:](https://bob.kemenparekraf.go.id/)

<https://bob.kemenparekraf.go.id/zona-otorita/>

- Freeman, R. Edward. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Kurniawan, W. (2005). *Sentra Pengembangan Desa Wisata di Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Tugas Akhir Program Diploma III Kepariwisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*.
- Latupapua, Yosevita Th.2015. "Implementasi Peran *Stakeholder* dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah." *Jurnal Agroforestri X* Nomor 1 ISSN : 1907-7556
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Oktari, R. (2021). *Indonesia Punya Ribuan Desa Wisata*. Retrieved from indonesiabaik.id Web site: <https://indonesiabaik.id/video-grafis/indonesia-punya-ribuan-desawisata#!>
- Pratiwi, T. (2008). *Potensi Karanggeneng sebagai Desa Wisata di Sleman. Tugas Akhir Program Diploma III Bahasa Prancis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*.
- Putra, A. M., 2006. *Konsep Desa Wisata*. *Jurnal Manajemen Pariwisata*.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan*

Kualitatif Dan R&D. Bandung:
ALFABETA.

Sulistiyani, Ambar. 2004. Kemitraan
dan Model-Model
Pemberdayaan (Partnership and
Empowerment Models), Gava
Media: Yogyakarta.